

PEMULIHAN EKONOMI INKLUSIF

Jalan Indonesia Menuju Kesejahteraan yang Lebih Merata

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Agustus 2026

PEMULIHAN EKONOMI INKLUSIF

Jalan Indonesia Menuju Kesejahteraan yang Lebih Merata

Strategi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan
untuk masa depan Indonesia.



1



Pertumbuhan Berkualitas

pertumbuhan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.

2



Lapangan Kerja Inklusif

pekerjaan layak bagi generasi muda dan daerah.

3



Penguatan UMKM

akses pembiayaan, digitalisasi, dan pasar.



ARAH STRATEGIS



Produktivitas



Inovasi



Pemerataan



Keberlanjutan

4



Pendidikan & Keterampilan

SDM unggul untuk daya saing jangka panjang.

5



Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

menjaga kelompok rentan saat transisi.

6



Pemerataan Wilayah & Ekonomi Hijau

pembangunan berkelanjutan dari desa hingga kota.



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyct.com/cv.pdf



IBM-ASMI

(Institut Bisnis dan Multimedia)



“Ekonomi yang tumbuh bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih adil, tangguh, dan bermartabat.”



Abstrak

Pemulihan ekonomi inklusif adalah proses mengembalikan sekaligus memperkuat kapasitas perekonomian agar pertumbuhan tidak berhenti pada peningkatan Produk Domestik Bruto, melainkan secara nyata memperluas kesempatan kerja bermutu, menaikkan produktivitas dan pendapatan rumah tangga, menurunkan kemiskinan, mempersempit ketimpangan, serta membuka akses yang lebih setara terhadap pendidikan, kesehatan, pembiayaan, teknologi, dan pasar. Bagi Indonesia, isu ini menjadi penting karena perekonomian telah kembali tumbuh relatif stabil setelah berbagai guncangan global, tetapi kualitas pertumbuhan masih menghadapi tantangan berupa informalitas kerja, kesenjangan antarwilayah, kerentanan kelas menengah, ketimpangan akses digital, dan perbedaan kemampuan daerah dalam menangkap peluang investasi. Artikel ini membahas pemulihan ekonomi inklusif sebagai strategi transformasi struktural yang menghubungkan kebijakan makroekonomi, penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan UMKM, pembangunan manusia, digitalisasi yang merata, reforma kebijakan wilayah, perlindungan sosial adaptif, transisi hijau, dan tata kelola yang akuntabel. Argumen utama artikel adalah bahwa pemulihan yang berkelanjutan harus dinilai dari seberapa luas masyarakat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan seberapa besar manfaatnya tersebar lintas kelompok sosial, gender, generasi, dan wilayah. Indonesia memerlukan kombinasi antara pertumbuhan yang cukup tinggi, produktivitas yang meningkat, institusi yang inklusif, serta kebijakan redistribusi dan pemberdayaan yang efektif agar pertumbuhan benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Kata Kunci: Pemulihan ekonomi; pertumbuhan inklusif; kesejahteraan; ketimpangan; kemiskinan; pekerjaan berkualitas; UMKM; transformasi struktural; pembangunan manusia; Indonesia.

Indikator Kontekstual Indonesia

Indikator	Capaian terbaru	Makna bagi inklusivitas
Pertumbuhan ekonomi	5,11% pada 2025	Menunjukkan ketahanan makro dan ruang untuk memperluas kesempatan ekonomi.
Kemiskinan	8,25% pada September 2025	Menurun, tetapi masih 23,36 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan.
Gini ratio	0,363 pada September 2025	Ketimpangan menurun, namun distribusi manfaat pertumbuhan tetap perlu dijaga.
Pengangguran terbuka	4,85% pada Agustus 2025	Penyerapan kerja membaik; fokus berikutnya adalah kualitas, upah, dan formalitas pekerjaan.

Sumber: BPS (2025; 2026a; 2026b; 2026c).

1. Pendahuluan: Dari Pemulihan Menuju Transformasi yang Inklusif

Pemulihan ekonomi sering dipahami secara sempit sebagai kembalinya pertumbuhan setelah terjadi kontraksi atau perlambatan. Dalam pengertian makroekonomi, indikator yang pertama dilihat biasanya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto, inflasi, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, nilai tukar, dan stabilitas sektor keuangan. Ukuran-ukuran tersebut penting karena tanpa stabilitas makro sulit membangun

kepercayaan dan aktivitas ekonomi. Namun, bagi negara sebesar dan seberagam Indonesia, pemulihan tidak cukup dinilai dari apakah angka pertumbuhan kembali positif. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang tertinggal, jenis pekerjaan apa yang tercipta, apakah produktivitas meningkat, dan apakah kesempatan hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Data resmi menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan 2024 sebesar 5,03 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang, sedangkan rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat 4,85 persen dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta per bulan (BPS, 2025, 2026a, 2026b, 2026c). Perkembangan ini memperlihatkan arah yang positif: pertumbuhan tetap terjaga, kemiskinan dan ketimpangan menurun, serta pasar kerja terus menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, indikator nasional agregat belum sepenuhnya menggambarkan kerentanan yang dialami berbagai kelompok, terutama pekerja informal, rumah tangga berpendapatan dekat garis kemiskinan, pemuda, perempuan, penduduk perdesaan, dan masyarakat di daerah dengan konektivitas serta akses layanan dasar yang terbatas.

Di sinilah konsep pemulihan ekonomi inklusif menjadi relevan. Pertumbuhan inklusif menekankan dua unsur sekaligus: proses dan hasil. Dari sisi proses, masyarakat harus memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi melalui pekerjaan, usaha, pendidikan, inovasi, kepemilikan aset produktif, dan akses terhadap pembiayaan. Dari sisi hasil, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perlu tersebar relatif luas sehingga kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menurun. Dengan demikian, inklusivitas bukanlah sekadar program bantuan sosial setelah pertumbuhan terjadi, tetapi karakter dari sistem ekonomi itu sendiri.

Sejumlah studi mengenai Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan tidak selalu otomatis. De Silva dan Sumarto (2014) menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan terhadap kelompok miskin sangat dipengaruhi dinamika distribusi pendapatan. Pukuh dan Widyasthika (2017) menemukan bahwa tingkat inklusivitas pertumbuhan dapat berubah antarperiode dan antarkawasan. Studi yang lebih baru juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan Indonesia belum sepenuhnya inklusif di seluruh provinsi, sehingga kualitas institusi, pendidikan, kesempatan kerja, dan struktur ekonomi daerah menjadi penentu penting (Rini & Tambunan, 2021; Soleh & Suwarni, 2023). Artinya, kenaikan PDB harus disertai mekanisme yang membuat produktivitas dan kesempatan ekonomi dapat dijangkau oleh kelompok yang lebih luas.

Artikel ini melihat pemulihan ekonomi inklusif sebagai agenda transformasi. Pemulihan bukan kembali kepada struktur lama sebelum krisis, melainkan kesempatan memperbaiki struktur ekonomi agar lebih produktif, tangguh, digital, hijau, dan berkeadilan. Perekonomian Indonesia perlu bergerak dari ketergantungan pada konsumsi dan komoditas menuju kombinasi manufaktur bernilai tambah, jasa modern, ekonomi kreatif, pertanian produktif, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang mampu menciptakan pekerjaan bermutu. Transformasi semacam itu menuntut kebijakan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, karena ketimpangan bukan hasil dari satu variabel tunggal melainkan akumulasi dari perbedaan akses terhadap modal manusia, infrastruktur, teknologi, jaringan pasar, pembiayaan, dan kualitas kelembagaan.

Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan pertumbuhan dan pemerataan manfaat. Pertumbuhan yang terlalu lambat akan membatasi ruang fiskal, investasi, dan penciptaan pekerjaan. Sebaliknya, pertumbuhan tinggi yang terkonsentrasi pada sektor padat modal atau wilayah tertentu dapat menghasilkan disparitas baru. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu mengembangkan sektor yang sekaligus

produktif, ekspansif, dan mampu menyerap tenaga kerja. Pemulihan inklusif bukan kompromi antara pertumbuhan dan pemerataan; keduanya harus dirancang sebagai tujuan yang saling memperkuat.

2. Memahami Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Inklusif

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi inklusif berbeda dari pertumbuhan yang hanya diukur berdasarkan rata-rata. Rata-rata pendapatan dapat meningkat walaupun sebagian besar peningkatan tersebut terkonsentrasi pada kelompok kecil. Karena itu, indikator agregat perlu dibaca bersama dengan distribusi pendapatan, kemiskinan, kualitas pekerjaan, akses layanan publik, mobilitas sosial, dan kesenjangan wilayah. Pertumbuhan disebut lebih inklusif apabila kelompok berpendapatan rendah dan menengah memperoleh peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap aset produktif yang memungkinkan mereka memperbaiki posisi ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam literatur pembangunan, terdapat beberapa pendekatan untuk mengukur inklusivitas. Pendekatan pro-poor growth menilai apakah pendapatan kelompok miskin tumbuh dan apakah kemiskinan turun seiring pertumbuhan. Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) mencoba menggabungkan pengaruh pertumbuhan dan distribusi sehingga dapat dilihat apakah perubahan pendapatan benar-benar memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin. Growth Incidence Curve menggambarkan bagaimana pertumbuhan pendapatan atau pengeluaran tersebar pada berbagai persentil populasi. Pendekatan lain menambahkan dimensi ketenagakerjaan, ketimpangan, gender, akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Pemulihan ekonomi inklusif memiliki dimensi waktu yang khas. Setelah suatu krisis, kebijakan sering bergerak melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah stabilisasi, yaitu melindungi daya beli, menjaga sistem keuangan, menghindari gelombang kebangkrutan, dan mempertahankan pekerjaan. Tahap kedua adalah pemulihan, yaitu menghidupkan kembali investasi, produksi, konsumsi, perdagangan, dan mobilitas ekonomi. Tahap ketiga adalah transformasi, yakni memperbaiki struktur yang sebelumnya membuat sebagian kelompok rentan. Pada tahap ketiga inilah inklusivitas menjadi sangat penting, karena pemulihan yang hanya mengembalikan pola lama berisiko menghidupkan kembali kesenjangan lama.

Indonesia perlu menempatkan inklusivitas sebagai inti dari tahap transformasi. Hal ini berarti kebijakan fiskal, moneter, industri, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, digital, dan daerah harus memiliki indikator inklusi yang terukur. Misalnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai realisasi modal, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, keterkaitan dengan pemasok lokal, transfer teknologi, dan distribusi manfaat wilayah. Keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah pengguna internet, tetapi juga dari kemampuan UMKM dan pekerja berpendapatan rendah untuk meningkatkan produktivitas melalui teknologi. Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari ekspor, tetapi juga dari kedalaman rantai nilai domestik dan kesempatan kerja yang dihasilkan.

Inklusivitas juga menuntut perspektif kapabilitas. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi hanya apabila mereka memiliki pendidikan, kesehatan, keterampilan, konektivitas, identitas hukum, akses keuangan, dan rasa aman. Karena itu, investasi sosial bukan beban terhadap pertumbuhan, melainkan fondasi produktivitas jangka panjang. Pendidikan yang bermutu meningkatkan kemampuan berpindah dari pekerjaan berproduktivitas rendah ke pekerjaan yang lebih baik. Layanan kesehatan mengurangi kehilangan jam kerja dan risiko jatuh miskin karena biaya pengobatan. Transportasi dan internet memperluas pasar tenaga kerja serta akses ke informasi. Perlindungan sosial mengurangi risiko sehingga rumah tangga berani berinvestasi dalam pendidikan dan usaha.

Pada akhirnya, pemulihan inklusif dapat dirumuskan sebagai proses membangun kembali ekonomi dengan tiga tujuan yang terintegrasi: memperbesar kue ekonomi, memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut menghasilkan kue tersebut, dan memastikan pembagian manfaat tidak terlalu timpang. Tiga tujuan itu membutuhkan produktivitas, partisipasi, dan distribusi yang sehat. Kebijakan yang hanya berfokus pada salah satunya akan kurang efektif. Redistribusi tanpa produktivitas dapat membatasi keberlanjutan fiskal; pertumbuhan tanpa partisipasi dapat meningkatkan ketimpangan; partisipasi tanpa peningkatan produktivitas dapat membuat masyarakat terjebak pada pekerjaan berpendapatan rendah.

3. Konteks Indonesia: Kemajuan Makro dan Tantangan Struktural

Konteks Indonesia memperlihatkan kombinasi antara ketahanan makroekonomi dan pekerjaan rumah struktural. Pertumbuhan di sekitar lima persen menunjukkan kemampuan ekonomi untuk tetap berkembang di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2025 menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan yang lebih tinggi serta berdaya tahan. Salah satu perhatian penting adalah penguatan kebijakan struktural dan industrialisasi, yang berkaitan langsung dengan agenda inklusivitas karena struktur produksi menentukan kualitas pekerjaan dan distribusi pendapatan.

Walaupun kemiskinan nasional menurun, kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2025, kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen dibandingkan 6,60 persen di perkotaan (BPS, 2026b). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemulihan perlu memberi perhatian pada transformasi pertanian, ekonomi desa, konektivitas, layanan publik, dan diversifikasi pekerjaan nonpertanian di perdesaan. Penduduk desa tidak boleh hanya menjadi konsumen produk dan teknologi dari kota; mereka perlu menjadi produsen dengan akses pasar, logistik, pembiayaan, dan teknologi yang lebih baik.

Ketimpangan juga memiliki dimensi spasial. Aktivitas ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa. Pada 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang sekitar 56,93 persen perekonomian nasional (BPS, 2026a). Konsentrasi ini tidak selalu buruk karena aglomerasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Masalah muncul apabila manfaat aglomerasi tidak diimbangi dengan pembangunan pusat pertumbuhan baru, konektivitas antarpulau, dan pengembangan kapasitas daerah. Pemerataan tidak berarti memecah pusat ekonomi yang efisien, melainkan memperkuat jaringan antarwilayah sehingga daerah lain dapat terhubung dengan rantai nilai nasional dan global.

Pasar kerja menjadi dimensi berikutnya. TPT yang menurun menunjukkan perbaikan, tetapi kualitas pekerjaan sama pentingnya dengan jumlah pekerjaan. Tantangan Indonesia adalah besarnya informalitas, kesenjangan upah, keterampilan yang tidak sesuai, dan produktivitas tenaga kerja yang bervariasi. Pekerjaan informal dapat menjadi pintu masuk ke pasar kerja dan sumber kewirausahaan, namun sering disertai ketidakpastian pendapatan, perlindungan sosial yang terbatas, serta akses pembiayaan dan pelatihan yang rendah. Karena itu, formalitas perlu dipahami bukan sekadar status administratif, melainkan proses peningkatan produktivitas, kepastian usaha, perlindungan pekerja, dan akses terhadap layanan ekonomi modern.

Kelas menengah dan kelompok aspiring middle class juga penting. Mereka merupakan mesin konsumsi, tabungan, pendidikan, dan kewirausahaan. Jika pendapatan mereka stagnan atau rentan terhadap kenaikan harga, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau beban perumahan, maka konsumsi rumah tangga dan mobilitas sosial ikut tertekan. Strategi inklusif perlu membantu rumah tangga naik kelas dan bertahan di kelas menengah

melalui pekerjaan bermutu, perumahan terjangkau, transportasi publik, pendidikan, kesehatan, dan sistem jaminan sosial yang memadai.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar: bonus demografi, basis pasar domestik yang luas, adopsi digital yang cepat, sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok kawasan, serta kapasitas UMKM yang sangat besar. Tantangannya adalah mengubah keunggulan potensial tersebut menjadi produktivitas dan pendapatan. Bonus demografi hanya menjadi dividen apabila generasi muda memiliki keterampilan dan pekerjaan. Sumber daya alam hanya menjadi kemakmuran berkelanjutan apabila hilirisasi menciptakan nilai tambah lokal, transfer teknologi, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Digitalisasi hanya menjadi pengungkit inklusi apabila kesenjangan keterampilan dan konektivitas dipersempit.

Dengan demikian, agenda pemulihan Indonesia bukan lagi sekadar mengembalikan aktivitas ekonomi. Indonesia perlu memperkuat fondasi agar pertumbuhan lebih tahan guncangan, menghasilkan pekerjaan produktif, dan mengurangi kesenjangan kesempatan. Kualitas transformasi akan menentukan apakah pertumbuhan lima persen menjadi jembatan menuju ekonomi berpendapatan tinggi atau justru menghasilkan stagnasi sosial karena produktivitas dan mobilitas penduduk tidak meningkat secara merata.

4. Pekerjaan Berkualitas sebagai Jantung Inklusivitas

Pekerjaan merupakan mekanisme utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rumah tangga. Bantuan sosial dapat melindungi kelompok rentan, tetapi peningkatan kesejahteraan yang bertahan lama biasanya terjadi ketika anggota rumah tangga memperoleh pekerjaan yang stabil, produktif, dan berupah layak. Karena itu, strategi pemulihan inklusif harus berorientasi pada penciptaan pekerjaan berkualitas, bukan sekadar penurunan statistik pengangguran.

Pekerjaan berkualitas memiliki beberapa ciri. Pertama, produktivitasnya cukup tinggi sehingga perusahaan mampu membayar upah yang meningkat seiring kompetensi. Kedua, terdapat kepastian dan perlindungan dasar, baik dalam bentuk kontrak yang jelas, keselamatan kerja, jaminan sosial, maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Ketiga, pekerjaan memberi ruang bagi peningkatan keterampilan dan mobilitas karier. Keempat, akses terhadap pekerjaan tidak diskriminatif berdasarkan gender, daerah asal, status sosial, maupun kondisi disabilitas. Kelima, pekerjaan kompatibel dengan perubahan teknologi sehingga pekerja tidak mudah tersingkir akibat otomatisasi.

Kebijakan industri dan investasi harus dinilai berdasarkan intensitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Sektor padat modal penting untuk meningkatkan ekspor dan produktivitas, tetapi perlu diimbangi sektor padat karya modern yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Manufaktur, agroindustri, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, perawatan kesehatan, pendidikan, logistik, konstruksi hijau, dan jasa digital dapat menjadi sumber pekerjaan apabila didukung oleh iklim usaha yang sehat dan rantai pasok domestik yang kuat.

Keterkaitan antara perusahaan besar dan UMKM perlu diperkuat. Investasi skala besar akan lebih inklusif apabila pemasok lokal memperoleh peluang memenuhi standar kualitas, mendapatkan kontrak yang stabil, serta menerima transfer pengetahuan. Program local supplier development dapat menghubungkan UMKM dengan kawasan industri, hotel, rumah sakit, perusahaan pertambangan, perusahaan makanan-minuman, dan platform digital. Di sinilah kebijakan inklusi berubah dari subsidi menjadi pembangunan kapasitas produktif.

Reformasi pasar kerja juga perlu menyeimbangkan fleksibilitas dan keamanan. Dunia usaha memerlukan kemampuan beradaptasi terhadap siklus bisnis dan teknologi, sementara pekerja memerlukan perlindungan terhadap risiko kehilangan pendapatan. Konsep flexicurity dapat menjadi inspirasi: proses penyesuaian tenaga kerja dibuat relatif fleksibel, tetapi diimbangi jaminan sosial, layanan penempatan kerja, pelatihan ulang, dan informasi pasar kerja. Tujuannya bukan mempertahankan setiap pekerjaan selamanya, melainkan mempertahankan employability setiap pekerja.

Generasi muda memerlukan perhatian khusus. Pengangguran dan pekerjaan yang tidak sesuai kompetensi pada usia awal karier dapat menimbulkan scarring effect terhadap pendapatan jangka panjang. Pendidikan vokasi, magang, apprenticeship, sertifikasi kompetensi, career center, dan kemitraan industri-kampus perlu dihubungkan dengan kebutuhan regional. Pemetaan keterampilan harus menggunakan data lowongan, investasi, tren teknologi, dan kebutuhan sektor sehingga kurikulum tidak tertinggal.

Bagi perempuan, inklusivitas pekerjaan membutuhkan ekosistem yang mendukung partisipasi. Ketersediaan childcare, keamanan transportasi, fleksibilitas kerja, perlindungan dari diskriminasi, dan kesempatan kepemimpinan dapat memperluas partisipasi sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Studi tentang inklusivitas di Indonesia menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan kontribusi perempuan dalam ekonomi berkaitan dengan capaian pertumbuhan yang lebih inklusif. Maka kebijakan gender tidak boleh diposisikan sebagai agenda tambahan, melainkan bagian dari produktivitas nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan harus tercermin pada kenaikan upah riil dan produktivitas, bukan hanya bertambahnya jumlah orang yang bekerja. Apabila pekerjaan tumbuh tetapi mayoritas berada pada kegiatan berproduktivitas sangat rendah, maka perekonomian dapat terlihat pulih tanpa menciptakan mobilitas sosial. Jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata harus melewati transformasi pekerjaan dari informal-rentan menuju produktif-terlindungi.

5. UMKM, Kewirausahaan, dan Demokratisasi Produktivitas

UMKM merupakan jaringan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka hadir dalam perdagangan, makanan, pertanian, jasa, manufaktur kecil, ekonomi kreatif, transportasi, dan berbagai kegiatan lokal. Karena jumlahnya besar dan tersebar, penguatan UMKM merupakan salah satu jalur paling langsung untuk menyebarkan manfaat pemulihan. Namun, kebijakan UMKM harus bergeser dari sekadar memperbanyak unit usaha menjadi meningkatkan produktivitas, survival rate, skala usaha, dan kemampuan masuk ke rantai nilai yang lebih besar.

Banyak UMKM menghadapi empat keterbatasan utama: modal, kompetensi manajerial, teknologi, dan pasar. Kredit murah membantu, tetapi tidak cukup apabila pelaku usaha tidak memiliki pencatatan, standar kualitas, desain produk, legalitas, atau akses pelanggan. Karena itu, pembiayaan perlu diintegrasikan dengan business development services. Pendampingan yang efektif harus berbasis tahap perkembangan usaha: mikro subsisten, mikro berkembang, usaha kecil, dan usaha menengah membutuhkan intervensi yang berbeda.

Digitalisasi dapat mendemokratisasi akses pasar, tetapi juga dapat menciptakan ketimpangan baru. Jamil (2022) menunjukkan bahwa penetrasi internet tidak otomatis membuat pertumbuhan lebih inklusif; dampaknya terhadap ketimpangan bergantung pada kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, program digitalisasi UMKM harus melampaui pembuatan akun marketplace. Pelaku usaha membutuhkan literasi data, pemasaran digital, pembayaran digital, keamanan siber, manajemen persediaan, layanan pelanggan, dan kemampuan menggunakan AI sederhana untuk produktivitas.

Ekosistem pembayaran digital dan inklusi keuangan dapat membantu usaha membangun jejak transaksi yang kemudian dapat menjadi dasar penilaian kredit. Penelitian di Indonesia timur menunjukkan adanya hubungan penting antara inklusi keuangan, pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan (Ratnawati, 2020). Namun, inklusi keuangan yang sehat juga membutuhkan perlindungan konsumen dan literasi agar pelaku usaha tidak masuk ke pembiayaan berbiaya tinggi yang meningkatkan kerentanan.

Pengadaan pemerintah dan BUMN dapat menjadi instrumen permintaan yang kuat. Jika sebagian belanja diarahkan secara transparan kepada UMKM yang memenuhi standar, pemerintah bukan hanya memberikan bantuan tetapi menciptakan pasar. Sistem e-procurement perlu disederhanakan bagi usaha kecil tanpa mengurangi integritas. Demikian pula, perusahaan besar dapat diberi insentif untuk mengembangkan pemasok lokal dan melaporkan proporsi belanja yang masuk ke UMKM domestik.

Koperasi modern dapat memainkan peran dalam mengatasi masalah skala. Banyak petani, nelayan, dan produsen kecil tidak memiliki volume cukup untuk bernegosiasi dengan pembeli atau mengakses teknologi. Melalui koperasi atau agregator yang dikelola secara profesional, mereka dapat membeli input lebih murah, menggunakan mesin bersama, melakukan grading, pengolahan, branding, dan pemasaran kolektif. Kunci keberhasilan koperasi bukan romantisme kelembagaan, tetapi tata kelola, profesionalisme, transparansi, dan insentif ekonomi yang jelas.

Kewirausahaan juga perlu dilihat sebagai proses inovasi, bukan pelarian dari kurangnya pekerjaan formal. Ekosistem startup sering berfokus pada teknologi tinggi, padahal inovasi dapat terjadi dalam agroindustri, pendidikan, kesehatan, logistik, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan jasa lokal. Inkubator perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghubungkan riset dengan kebutuhan pasar lokal. Dengan cara ini, UMKM dan kewirausahaan menjadi kendaraan transformasi struktural dari bawah, bukan sekadar penyangga saat ekonomi formal tidak mampu menyerap tenaga kerja.

6. Pembangunan Manusia: Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan

Tidak ada pertumbuhan inklusif tanpa pembangunan manusia. Dalam ekonomi modern, produktivitas semakin ditentukan oleh pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, literasi digital, kesehatan, dan kemampuan beradaptasi. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada akhirnya berubah menjadi ketimpangan pendapatan. Karena itu, pemulihan inklusif harus memperlakukan belanja pendidikan dan kesehatan sebagai investasi produktivitas jangka panjang.

Pendidikan dasar harus menjamin fondasi literasi, numerasi, sains, karakter, dan kemampuan belajar. Tantangan bukan hanya angka partisipasi, tetapi kualitas hasil belajar. Anak yang berada di sekolah tetapi tidak memperoleh kompetensi dasar akan memasuki pasar kerja dengan kemampuan terbatas. Pemulihan pembelajaran, pelatihan guru, asesmen diagnostik, dan intervensi berbasis sekolah perlu diprioritaskan terutama di daerah dengan hasil belajar rendah.

Pada pendidikan menengah dan tinggi, tantangannya adalah relevansi. Dunia kerja berubah cepat karena digitalisasi, otomatisasi, AI, transisi energi, dan restrukturisasi rantai pasok. Program studi dan pendidikan vokasi perlu membangun kurikulum adaptif yang disusun bersama industri. Soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, etika, kreativitas, dan critical thinking tetap penting karena banyak pekerjaan masa depan membutuhkan kombinasi kompetensi manusia dan teknologi.

Reskilling dan upskilling harus menjadi sistem nasional, bukan proyek sesaat. Orang dewasa membutuhkan akses ke micro-credentials, pelatihan modular, sertifikasi, dan pembelajaran daring yang

terjangkau. Perusahaan dapat diberi insentif untuk berinvestasi pada pelatihan pekerja, sedangkan pemerintah menyediakan learning account atau bantuan bagi pekerja yang rentan terdampak otomasi. Perguruan tinggi dapat membuka program pendidikan eksekutif dan vokasi pendek yang menghubungkan ilmu dengan kebutuhan sektor.

Kesehatan berperan langsung terhadap produktivitas. Rumah tangga yang menghadapi penyakit kronis, stunting, masalah kesehatan mental, atau biaya pengobatan tinggi akan mengalami penurunan kapasitas kerja dan tabungan. Penguatan layanan primer, pencegahan penyakit, nutrisi, kesehatan ibu-anak, dan pembiayaan kesehatan yang efisien membantu mencegah kemiskinan akibat guncangan kesehatan. Di sisi lain, sektor kesehatan sendiri merupakan sumber pekerjaan berkualitas yang terus berkembang seiring perubahan demografi.

Kesenjangan wilayah dalam pendidikan dan kesehatan harus ditangani melalui distribusi tenaga profesional, teknologi telemedicine, pembelajaran digital, insentif daerah khusus, dan perbaikan infrastruktur. Namun teknologi tidak boleh menggantikan kapasitas institusi lokal. Telemedicine hanya efektif apabila tersedia tenaga kesehatan, rujukan, obat, dan konektivitas; pembelajaran daring hanya efektif apabila siswa memiliki perangkat, internet, dan pendampingan.

Pembangunan manusia pada akhirnya menciptakan mobilitas antargenerasi. Anak dari keluarga miskin yang memperoleh pendidikan berkualitas dan kesehatan yang baik memiliki peluang lebih besar memasuki pekerjaan produktif. Dengan demikian, kebijakan sosial dan kebijakan produktivitas bertemu pada satu titik: meningkatkan kapabilitas manusia. Pemulihan ekonomi yang mengabaikan dimensi ini mungkin menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi akan sulit mempertahankan daya saing dan pemerataan dalam jangka panjang.

7. Infrastruktur dan Konektivitas sebagai Penghubung Kesempatan

Infrastruktur memiliki fungsi inklusif apabila mengurangi biaya akses terhadap pasar, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, transportasi publik, perumahan, dan internet merupakan jaringan yang menentukan apakah suatu daerah dapat berpartisipasi dalam ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur yang hanya dinilai dari nilai proyek dapat kehilangan tujuan sosialnya; yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur mengubah biaya dan kesempatan bagi masyarakat.

Konektivitas antarwilayah sangat penting bagi negara kepulauan. Biaya logistik yang tinggi membuat harga barang di daerah terpencil lebih mahal dan menurunkan daya saing produk lokal. Pembangunan pelabuhan, tol laut, cold chain, pergudangan, dan integrasi moda transportasi dapat memperbaiki ekonomi wilayah. Namun infrastruktur fisik harus diikuti penguatan institusi logistik dan kompetisi agar penurunan biaya benar-benar diteruskan kepada konsumen dan produsen.

Di perkotaan, transportasi publik yang baik merupakan kebijakan pemerataan. Pekerja berpendapatan rendah sering tinggal jauh dari pusat pekerjaan karena harga perumahan. Jika biaya dan waktu perjalanan tinggi, sebagian pendapatan habis untuk transportasi dan peluang kerja menjadi sempit. Transit-oriented development, transportasi massal, dan perumahan terjangkau dapat memperluas pasar tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas kota.

Infrastruktur digital kini sama pentingnya dengan jalan dan listrik. Internet berkecepatan memadai memungkinkan pendidikan, telemedicine, e-commerce, pembayaran digital, administrasi publik, dan

pekerjaan jarak jauh. Namun konektivitas harus disertai affordability dan keterampilan. Apabila hanya kelompok berpendapatan tinggi yang mampu menggunakan layanan digital produktif, digitalisasi dapat memperbesar kesenjangan. Karena itu, kebijakan broadband perlu diarahkan pada universal meaningful connectivity, yaitu koneksi yang bukan sekadar tersedia tetapi cukup cepat, terjangkau, aman, dan benar-benar dapat digunakan.

Infrastruktur energi juga menentukan inklusi. Keandalan listrik penting bagi industri kecil, usaha digital, cold storage, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Transisi ke energi bersih membuka peluang microgrid, tenaga surya atap, dan solusi energi terdesentralisasi untuk daerah tertentu. Program transisi harus dirancang agar tidak meningkatkan beban kelompok rentan melalui harga energi yang terlalu tinggi tanpa kompensasi atau alternatif.

Pembangunan infrastruktur sebaiknya menggunakan analisis manfaat distribusional. Dua proyek dengan nilai ekonomi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial berbeda. Proyek yang menghubungkan wilayah miskin ke pusat pasar mungkin memberikan manfaat inklusi lebih besar daripada proyek yang hanya mempercepat perjalanan kelompok yang sudah terlayani. Karena itu, appraisal proyek perlu memasukkan indikator akses pekerjaan, penurunan biaya logistik bagi UMKM, peningkatan layanan dasar, serta dampak terhadap kelompok rentan.

Dengan perspektif tersebut, infrastruktur bukan tujuan melainkan platform kesempatan. Pemulihan inklusif membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan masyarakat ke sumber produktivitas dan memungkinkan wilayah di luar pusat ekonomi utama berpartisipasi dalam pertumbuhan.

8. Perlindungan Sosial Adaptif dan Mobilitas Ekonomi

Pertumbuhan inklusif memerlukan perlindungan sosial yang mampu melindungi rumah tangga dari guncangan sekaligus membantu mereka naik kelas. Risiko ekonomi dapat berasal dari kehilangan pekerjaan, penyakit, bencana, kenaikan harga pangan, perubahan iklim, atau kegagalan usaha. Tanpa perlindungan, rumah tangga rentan sering menjual aset, menarik anak dari sekolah, mengurangi gizi, atau berutang mahal. Tindakan tersebut dapat mengurangi kemiskinan sementara tetapi memperdalam kemiskinan jangka panjang.

Perlindungan sosial modern perlu memiliki tiga fungsi: protective, preventive, dan promotive. Fungsi protective memberikan bantuan saat rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Fungsi preventive melalui jaminan sosial mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan, usia tua, atau kehilangan pekerjaan. Fungsi promotive membantu penerima meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, akses kerja, modal usaha, layanan penitipan anak, dan dukungan kewirausahaan.

Integrasi data menjadi kunci. Program sosial harus menggunakan data yang mutakhir dan interoperabel agar bantuan tepat sasaran serta mudah menyesuaikan diri ketika terjadi guncangan. Dynamic social registry yang diperbarui secara berkala akan lebih baik daripada daftar statis. Pada saat yang sama, mekanisme pengaduan dan koreksi perlu tersedia karena tidak ada sistem data yang sempurna.

Bantuan sosial juga perlu dirancang agar tidak menciptakan disinsentif untuk bekerja. Ini dapat dilakukan dengan tapering benefit, yaitu bantuan berkurang secara bertahap ketika pendapatan meningkat, bukan langsung hilang. Dengan demikian, rumah tangga tidak menghadapi welfare cliff yang membuat kenaikan pendapatan kecil justru menghilangkan bantuan besar. Kebijakan semacam ini penting bagi transisi dari penerima bantuan menuju keluarga mandiri.

Jaminan kehilangan pekerjaan, layanan penempatan, dan pelatihan ulang menjadi semakin relevan karena perubahan teknologi. Pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat restrukturisasi industri membutuhkan dukungan agar cepat pindah ke pekerjaan baru. Sistem perlindungan sosial perlu lebih portable bagi pekerja lintas perusahaan dan pekerja platform, karena karier modern semakin fleksibel.

Kelompok lansia, penyandang disabilitas, anak, dan rumah tangga yang tidak memiliki kapasitas kerja tetap membutuhkan perlindungan berbasis hak sosial. Inklusivitas tidak berarti semua orang harus masuk ke pasar kerja; sebagian masyarakat memerlukan dukungan karena kondisi biologis atau sosial. Negara yang inklusif mengakui perbedaan kemampuan dan menyediakan reasonable accommodation.

Perlindungan sosial dengan demikian bukan lawan dari kebijakan produktivitas. Ia menciptakan fondasi keamanan yang memungkinkan masyarakat mengambil risiko produktif, berinvestasi dalam keterampilan, dan menghadapi transisi ekonomi. Pemulihan yang tidak memiliki jaring pengaman kuat akan rapuh karena setiap guncangan baru dapat mengembalikan jutaan rumah tangga ke kondisi rentan.

9. Transformasi Pertanian, Perdesaan, dan Ketahanan Pangan

Kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa agenda inklusif harus memberi posisi sentral pada pertanian dan ekonomi desa. Pertanian bukan sekadar sektor tradisional; ia merupakan sumber pendapatan, pangan, bahan baku industri, dan pekerjaan bagi jutaan keluarga. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan ketahanan petani terhadap risiko iklim serta volatilitas harga.

Produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui benih unggul, mekanisasi tepat guna, irigasi, extension service, digital agriculture, pembiayaan, dan pengelolaan pascapanen. Namun teknologi harus sesuai dengan skala dan kondisi petani. Mekanisasi yang tidak disertai model layanan bersama dapat terlalu mahal bagi petani kecil. Karena itu, koperasi, badan usaha milik desa, atau penyedia jasa alsintan dapat menjadi mekanisme berbagi aset.

Hilirisasi pertanian merupakan jalan penting menuju pendapatan yang lebih tinggi. Jika desa hanya menjual bahan mentah, sebagian besar nilai tambah berada di kota atau perusahaan pengolahan. Pengembangan industri pangan, pengolahan hasil perkebunan, cold storage, packaging, branding, dan standardisasi dapat mempertahankan nilai tambah di daerah. Hal ini juga menciptakan pekerjaan nonpertanian di perdesaan bagi pemuda dan perempuan.

Ketahanan pangan perlu dipahami tidak hanya sebagai ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, kualitas gizi, dan stabilitas. Kebijakan harga yang terlalu menekan produsen dapat melemahkan insentif produksi, sedangkan harga yang terlalu tinggi membebani konsumen miskin. Pemerintah perlu menggunakan kombinasi cadangan pangan, logistik, informasi harga, produktivitas, dan bantuan terarah untuk menjaga keseimbangan.

Perubahan iklim menambah risiko. Petani kecil paling rentan terhadap kekeringan, banjir, hama, dan perubahan musim. Asuransi pertanian, informasi cuaca, varietas tahan iklim, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan air perlu diperkuat. Pemulihan inklusif harus climate-resilient karena guncangan iklim dapat menghapus kemajuan pengurangan kemiskinan.

Desa juga perlu mengembangkan sumber pertumbuhan di luar pertanian. Pariwisata lokal, kerajinan, jasa perawatan, energi terbarukan, ekonomi digital, logistik, dan pengolahan dapat menciptakan diversifikasi pendapatan. Konektivitas internet dan jalan memungkinkan usaha desa menjangkau pasar lebih luas. Namun pembangunan harus mempertahankan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Transformasi perdesaan yang berhasil akan mengurangi tekanan urbanisasi terpaksa dan menciptakan pilihan. Masyarakat seharusnya pindah ke kota karena melihat peluang yang lebih baik, bukan karena desa tidak menyediakan kehidupan layak. Kesejahteraan yang lebih merata berarti lokasi kelahiran tidak terlalu menentukan kesempatan ekonomi seseorang.

10. Digitalisasi, AI, dan Inklusi Ekonomi

Digitalisasi dan kecerdasan buatan menjadi kekuatan baru yang dapat mempercepat produktivitas sekaligus menimbulkan ketimpangan. Teknologi mengurangi biaya transaksi, mempercepat akses informasi, menciptakan platform pasar, dan mengotomatisasi pekerjaan administratif. Bagi UMKM, teknologi memungkinkan pemasaran, pembayaran, pencatatan, dan layanan pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Bagi pemerintah, data dan AI dapat meningkatkan penargetan program, perencanaan, serta pelayanan publik.

Namun efek inklusif tidak otomatis. Digital divide terdiri dari beberapa lapisan: akses perangkat, kualitas jaringan, keterjangkauan, literasi digital, keamanan, dan kemampuan produktif. Seseorang dapat memiliki smartphone tetapi hanya menggunakannya untuk hiburan, sementara kelompok lain memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kesenjangan kemampuan ini dapat memperlebar premium keterampilan.

Strategi nasional perlu berfokus pada digital capability, bukan hanya digital adoption. Kurikulum sekolah dan pelatihan kerja harus memperkenalkan literasi data, AI literacy, keamanan siber, dan kemampuan menggunakan alat digital untuk pemecahan masalah. Pelaku UMKM perlu mendapat pelatihan yang berbasis kasus nyata: membuat katalog, mengelola inventori, menghitung biaya, menganalisis pelanggan, atau menggunakan generative AI untuk pemasaran dengan tetap memperhatikan etika dan privasi.

AI juga akan mengubah struktur pekerjaan. Sebagian tugas rutin akan diotomatisasi, tetapi pekerjaan baru muncul pada data, desain, pemeliharaan sistem, keamanan, layanan kreatif, dan berbagai pekerjaan yang memerlukan interaksi manusia. Kebijakan tidak seharusnya berusaha menghentikan otomatisasi, melainkan mempercepat adaptasi pekerja. Social dialogue antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang terpapar dan merancang jalur transisi.

Pemerintah dapat menggunakan pengadaan untuk mendorong inovasi lokal. Solusi AI untuk pertanian, kesehatan, pendidikan, administrasi daerah, dan kebencanaan dapat dikembangkan oleh startup dan perguruan tinggi Indonesia. Data publik yang aman dan berkualitas dapat menjadi public infrastructure untuk inovasi. Namun governance harus kuat: perlindungan data pribadi, audit algoritma, mitigasi bias, keamanan siber, dan transparansi penggunaan AI sangat penting agar teknologi tidak mengorbankan hak masyarakat.

Digitalisasi sektor keuangan juga perlu memperkuat inklusi tanpa meningkatkan over-indebtedness. Fintech dapat menjangkau pengguna yang sebelumnya tidak dilayani bank, tetapi scoring algoritmik yang tidak transparan dapat menimbulkan diskriminasi. Regulasi perlu menyeimbangkan inovasi, stabilitas, perlindungan konsumen, dan kompetisi.

Pada akhirnya, teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperluas capability. Ukuran keberhasilan bukan jumlah aplikasi, tetapi peningkatan produktivitas pekerja, pendapatan UMKM, akses layanan publik, dan kesempatan bagi daerah yang sebelumnya tertinggal. Pemulihan digital yang inklusif memastikan AI menjadi augmentasi bagi manusia, bukan hanya substitusi tenaga kerja untuk mengejar efisiensi jangka pendek.

11. Ekonomi Hijau dan Just Transition

Pemulihan ekonomi masa kini tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia menghadapi kebutuhan untuk memperluas kesempatan ekonomi sekaligus menurunkan emisi, menjaga hutan, memperbaiki kualitas udara dan air, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana. Agenda hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru apabila dirancang sebagai transformasi industri dan pekerjaan, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Investasi energi terbarukan, efisiensi energi, kendaraan listrik, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, pertanian berkelanjutan, dan bangunan hijau dapat menciptakan pekerjaan baru. Namun transisi juga menciptakan kelompok yang berpotensi kehilangan pendapatan, misalnya pekerja dan daerah yang bergantung pada industri berbasis fosil. Konsep just transition menuntut agar biaya perubahan tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh pekerja dan masyarakat lokal.

Program reskilling harus dimulai sebelum penutupan atau penyusutan industri, bukan sesudahnya. Pemerintah daerah perlu memiliki peta pekerjaan dan kompetensi yang terdampak. Pendapatan daerah yang berkurang akibat transisi energi perlu diantisipasi melalui diversifikasi ekonomi. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu pekerja berpindah ke fungsi baru.

Ekonomi hijau harus memperhatikan affordability. Kebijakan harga karbon atau penghapusan subsidi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi dampaknya terhadap rumah tangga miskin perlu dikompensasi melalui transfer terarah, transportasi publik, atau dukungan energi bersih. Dengan desain yang baik, reformasi subsidi dapat mengalihkan anggaran dari konsumsi energi yang regresif menuju pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Potensi natural capital Indonesia juga besar. Hutan, mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati memberikan layanan ekosistem. Skema pembayaran jasa lingkungan, carbon market, dan eco-tourism dapat menciptakan pendapatan bagi masyarakat lokal apabila hak tenurial jelas dan pembagian manfaat adil. Tanpa governance yang baik, ekonomi hijau berisiko menjadi bentuk ekstraksi baru yang hanya mengganti komoditas.

Pemulihan inklusif berarti menyatukan tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertumbuhan yang memperbaiki pendapatan tetapi merusak sumber air dan meningkatkan risiko bencana akan menurunkan kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan lingkungan yang mengabaikan mata pencaharian dapat kehilangan legitimasi sosial. Jalan yang paling kuat adalah membangun industri hijau yang produktif, menciptakan pekerjaan, dan melindungi masyarakat rentan selama masa transisi.

12. Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Pembiayaan untuk Inklusivitas

Stabilitas makroekonomi adalah prasyarat inklusivitas. Inflasi yang tinggi terutama merugikan rumah tangga berpendapatan rendah karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan kebutuhan dasar lebih besar. Nilai tukar yang sangat volatil meningkatkan biaya input dan ketidakpastian investasi. Krisis keuangan dapat menghapus pekerjaan dan tabungan. Karena itu, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan merupakan bentuk perlindungan sosial tidak langsung.

Namun stabilitas saja tidak cukup. Kebijakan fiskal harus mengarahkan sumber daya kepada investasi yang memiliki multiplier ekonomi dan sosial tinggi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, riset, digitalisasi, dan transformasi produktif perlu diprioritaskan. Tantangannya adalah ruang fiskal terbatas, sehingga kualitas belanja sama pentingnya dengan jumlah belanja.

Evaluasi program berbasis outcome harus diperkuat. Anggaran tidak boleh dinilai semata-mata dari tingkat penyerapan. Program pelatihan harus diukur dari peningkatan pekerjaan dan pendapatan; proyek infrastruktur dari penurunan biaya akses; insentif investasi dari pekerjaan, produktivitas, dan transfer teknologi. Dengan demikian, setiap rupiah belanja publik dapat dinilai kontribusinya terhadap inklusi.

Desentralisasi fiskal juga memainkan peran penting karena layanan dasar dan pembangunan wilayah banyak dilaksanakan pemerintah daerah. Studi Priscilla, Rindayati, dan Anggraeni (2025) menekankan hubungan antara desentralisasi fiskal, kinerja institusi, dan inclusive growth. Transfer pusat perlu dirancang untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal sambil menciptakan insentif kinerja. Daerah yang meningkatkan layanan, iklim investasi, dan pengelolaan keuangan seharusnya memperoleh ruang lebih besar untuk inovasi.

Sistem perpajakan perlu cukup progresif tanpa melemahkan insentif produktif. Basis pajak dapat diperluas melalui digitalisasi administrasi, pengurangan penghindaran, dan peningkatan kepatuhan. Penerimaan yang kuat memungkinkan negara membiayai layanan publik yang meningkatkan mobilitas sosial. Pada saat yang sama, insentif pajak perlu transparan dan dievaluasi agar tidak menjadi transfer kepada perusahaan tanpa manfaat tambahan yang jelas.

Pembiayaan pembangunan dapat melibatkan bank, pasar modal, dana pensiun, sovereign funds, green bonds, dan blended finance. Tetapi pembiayaan harus diarahkan pada proyek yang viable dan memberikan manfaat luas. UMKM memerlukan instrumen kredit, penjaminan, equity, dan supply-chain financing yang sesuai dengan tahap usahanya. Pembiayaan hijau juga dapat membuka modal bagi proyek efisiensi energi dan energi terbarukan.

Koordinasi fiskal-moneter menjadi penting ketika ekonomi menghadapi trade-off antara inflasi dan pertumbuhan. Sinergi tidak berarti hilangnya independensi kebijakan, tetapi pertukaran informasi dan konsistensi arah. Tujuan akhirnya adalah lingkungan makro yang stabil, biaya modal yang wajar, dan ruang fiskal yang mampu membiayai investasi sosial-produktif. Inilah fondasi bagi pertumbuhan yang tahan guncangan dan lebih merata.

13. Tata Kelola, Institusi, dan Kepercayaan

Institusi menentukan apakah kebijakan inklusif benar-benar bekerja. Dua daerah dengan anggaran sama dapat menghasilkan kualitas layanan berbeda karena perbedaan kapasitas birokrasi, integritas, koordinasi, data, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola bukan isu administratif yang terpisah dari ekonomi; ia merupakan salah satu determinan produktivitas dan distribusi kesempatan.

Kepastian regulasi dan penegakan hukum memengaruhi investasi. UMKM maupun perusahaan besar membutuhkan perizinan yang sederhana, aturan yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kompleksitas regulasi menciptakan biaya yang relatif lebih berat bagi usaha kecil karena mereka tidak memiliki tim hukum dan kepatuhan. Penyederhanaan prosedur, digital public services, dan interoperabilitas data dapat menurunkan biaya transaksi.

Transparansi penting agar program pembangunan tidak ditangkap kelompok tertentu. Informasi pengadaan, penerima insentif, indikator kinerja, dan hasil evaluasi perlu mudah diakses. Open data memungkinkan akademisi, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha melakukan pengawasan serta menghasilkan inovasi. Namun transparansi data harus tetap menghormati privasi.

Partisipasi masyarakat memperbaiki relevansi kebijakan. Program desa, urban upgrading, pelatihan, dan bantuan usaha lebih efektif apabila kebutuhan pengguna dipahami. Co-creation dengan masyarakat bukan berarti semua keputusan harus populer, tetapi proses kebijakan memperoleh informasi lokal yang sering tidak terlihat dari data pusat.

Kapasitas pemerintah daerah sangat beragam. Pemerintah pusat perlu menyediakan standar, platform data, pelatihan, dan technical assistance. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai knowledge partner daerah melalui riset, evaluasi kebijakan, dan pengembangan SDM. Kolaborasi semacam ini membuat ilmu pengetahuan lebih dekat dengan masalah pembangunan.

Kepercayaan adalah modal ekonomi. Ketika masyarakat percaya pajak digunakan secara efektif, kepatuhan meningkat. Ketika dunia usaha percaya aturan stabil, investasi meningkat. Ketika pekerja percaya sistem perlindungan sosial, mereka lebih berani menghadapi perubahan. Korupsi dan inkonsistensi sebaliknya meningkatkan transaction costs dan memperkuat ketimpangan karena kelompok yang memiliki koneksi mendapat akses lebih besar.

Inklusivitas akhirnya sangat berkaitan dengan fairness. Masyarakat tidak menuntut semua orang memperoleh hasil sama, tetapi mereka berharap aturan berlaku adil dan ada peluang untuk maju melalui usaha dan kemampuan. Institusi yang inklusif menjaga kompetisi, mencegah rente, menyediakan layanan dasar, dan melindungi hak. Tanpa fondasi tersebut, pertumbuhan dapat menjadi tinggi tetapi rapuh secara sosial.

14. Pemerataan Wilayah dan Strategi Berbasis Tempat

Indonesia tidak dapat menerapkan satu resep pembangunan untuk semua wilayah. Struktur ekonomi Jakarta berbeda dari Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau Maluku. Bahkan di dalam satu provinsi terdapat perbedaan besar antara kota inti, pinggiran, daerah pertanian, kawasan industri, dan wilayah kepulauan. Karena itu, pemulihan inklusif memerlukan place-based policy yang memanfaatkan keunggulan lokal dan mengatasi constraint spesifik.

Strategi wilayah sebaiknya dimulai dari diagnosis: sektor apa yang memiliki comparative advantage, keterampilan apa yang tersedia, infrastruktur apa yang kurang, pasar mana yang dapat dijangkau, dan institusi apa yang perlu diperkuat. Daerah pertanian mungkin memerlukan cold chain dan agroprocessing; daerah wisata memerlukan konektivitas dan pengelolaan destinasi; daerah industri memerlukan perumahan pekerja, transportasi, dan pendidikan vokasi; daerah terpencil memerlukan layanan dasar dan konektivitas digital.

Pusat pertumbuhan baru harus dibangun sebagai jaringan, bukan enclave. Kawasan industri yang terpisah dari ekonomi lokal dapat menghasilkan PDRB tinggi tanpa keterkaitan yang kuat. Linkage policy perlu mendorong pembelian lokal, pelatihan tenaga kerja, pengembangan pemasok, dan investasi infrastruktur yang juga digunakan masyarakat. Ini penting dalam hilirisasi mineral maupun pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Perkotaan menengah dapat menjadi simpul pemerataan karena mampu menyerap urbanisasi tanpa tekanan sebesar megapolitan. Penguatan kota menengah melalui transportasi, perguruan tinggi, rumah sakit, layanan bisnis, dan industri lokal dapat menyebarkan aglomerasi. Hubungan kota-desa juga perlu diperkuat agar produk perdesaan memiliki pasar dan masyarakat desa dapat mengakses layanan kota.

Desentralisasi inovasi harus didukung. Pemerintah daerah dapat menguji model kebijakan yang sesuai kondisi lokal, tetapi memerlukan data dan kapasitas evaluasi. Praktik baik antarwilayah dapat disebarkan

melalui knowledge network. Indikator kinerja daerah seharusnya tidak hanya membandingkan pertumbuhan PDRB, tetapi juga kemiskinan, ketimpangan, pekerjaan formal, produktivitas, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan, dan kepuasan layanan.

Wilayah timur Indonesia memerlukan perhatian terhadap biaya logistik, skala pasar, dan layanan dasar. Strategi yang hanya mengandalkan transfer fiskal tidak cukup. Daerah perlu terhubung dengan value chain yang nyata. Perikanan, pariwisata, pertanian khusus, energi bersih, ekonomi biru, dan jasa berbasis digital dapat menjadi sumber pertumbuhan, tetapi memerlukan investasi pada manusia dan kelembagaan lokal.

Pemerataan wilayah bukan berarti setiap daerah harus memiliki struktur ekonomi yang sama. Tujuannya adalah memberi setiap warga akses yang masuk akal terhadap kesempatan, tanpa lokasi geografis menjadi penghalang permanen. Dalam negara kepulauan, keadilan spasial merupakan bagian inti dari inklusivitas.

15. Kerangka Kebijakan Terpadu: Dari Program ke Ekosistem

Salah satu kelemahan kebijakan pembangunan adalah fragmentasi. Program pendidikan berjalan sendiri, program UMKM sendiri, bantuan sosial sendiri, infrastruktur sendiri, dan investasi sendiri. Padahal rumah tangga mengalami semua dimensi secara bersamaan. Seorang pemuda miskin di desa membutuhkan pendidikan, transportasi, internet, keterampilan, informasi kerja, dan mungkin pembiayaan. Jika salah satu mata rantai hilang, peluang mobilitas menurun.

Karena itu, pemulihan inklusif perlu menggunakan pendekatan ekosistem. Di wilayah industri, misalnya, investasi perusahaan perlu dihubungkan dengan SMK/politeknik, pusat pelatihan, transportasi pekerja, perumahan, daycare, layanan kesehatan, dan pengembangan pemasok lokal. Di wilayah pertanian, program irigasi perlu dihubungkan dengan penyuluhan, pembiayaan, koperasi, pengolahan, logistik, dan pemasaran. Integrasi ini membuat multiplier kebijakan lebih besar.

Pemerintah dapat membangun dashboard inclusive growth yang menggabungkan indikator pertumbuhan, kemiskinan, Gini, pekerjaan formal, upah riil, produktivitas, partisipasi perempuan, youth NEET, akses internet, pembiayaan UMKM, hasil belajar, kesehatan, dan emisi. Dashboard harus tersedia nasional dan daerah agar kebijakan responsif terhadap perbedaan wilayah.

Target perlu disusun dalam bentuk outcome. Contohnya bukan hanya “melatih satu juta orang”, tetapi “meningkatkan proporsi peserta yang memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi dalam enam bulan”. Bukan hanya “menyalurkan kredit UMKM”, tetapi “meningkatkan produktivitas dan survival usaha”. Bukan hanya “membangun jalan”, tetapi “menurunkan waktu tempuh dan biaya logistik untuk sentra produksi”.

Pendekatan eksperimental dan evaluasi dampak perlu lebih sering digunakan. Program yang efektif diperluas, yang tidak efektif diperbaiki atau dihentikan. Budaya kebijakan berbasis bukti akan memperbaiki efisiensi fiskal dan mengurangi kecenderungan mempertahankan program karena alasan administratif atau politik.

Kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting karena sebagian besar pekerjaan diciptakan oleh dunia usaha. Namun public-private partnership harus memiliki pembagian risiko yang adil dan tujuan publik yang jelas. Dunia usaha dapat menyumbang investasi, inovasi, dan manajemen; pemerintah menyediakan regulasi, infrastruktur, data, dan perlindungan sosial. Perguruan tinggi memberikan riset dan SDM; masyarakat sipil membantu partisipasi dan pengawasan.

Kerangka terpadu juga perlu memiliki mekanisme antisipasi krisis. Sistem fiskal, data sosial, cadangan pangan, kesehatan, dan keuangan harus dapat merespons cepat ketika terjadi guncangan. Dengan demikian, Indonesia tidak selalu memulai dari nol setiap terjadi krisis. Resilience dan inclusiveness harus dibangun sebelum guncangan berikutnya datang.

16. Roadmap Pemulihan Inklusif Indonesia 2026-2035

Roadmap dapat dibagi menjadi tiga horizon. Horizon pertama, 2026-2028, berfokus pada konsolidasi pemulihan dan penguatan fondasi. Prioritasnya adalah menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, mempercepat penciptaan pekerjaan, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memulihkan pembelajaran, serta memperbaiki iklim investasi. Digitalisasi data sosial dan layanan kerja harus dipercepat sehingga intervensi lebih tepat sasaran.

Pada horizon pertama, pemerintah juga perlu mengidentifikasi sektor job-rich growth pada setiap koridor ekonomi. Insentif investasi diarahkan pada sektor dengan linkage domestik dan potensi ekspor. UMKM diberikan business development services yang terintegrasi dengan pembiayaan. Program magang dan pelatihan berbasis industri diperluas. Infrastruktur yang menyelesaikan bottleneck logistik dan konektivitas digital diprioritaskan.

Horizon kedua, 2029-2031, berfokus pada scale-up transformasi produktivitas. Industri pengolahan, ekonomi digital, agroindustri, kesehatan, pariwisata, dan energi hijau diperkuat. Keterkaitan perusahaan besar-UMKM meningkat. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi semakin terhubung dengan riset terapan. Sistem lifelong learning menjadi lebih luas. Reformasi perpajakan dan belanja meningkatkan ruang fiskal untuk investasi manusia.

Pada fase ini, daerah harus mulai menunjukkan spesialisasi ekonomi yang lebih jelas. Kota menengah tumbuh sebagai pusat jasa dan industri, sementara perdesaan meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan layanan modern. Transisi energi memasuki tahap lebih intensif, sehingga program just transition perlu matang. Perlindungan sosial menjadi lebih portable dan adaptif terhadap pola kerja fleksibel.

Horizon ketiga, 2032-2035, menempatkan Indonesia menuju ekonomi berpendapatan lebih tinggi dengan basis kelas menengah yang kuat. Fokus bergeser dari penyerapan tenaga kerja ke produktivitas tinggi, inovasi, dan kualitas hidup. Pekerjaan formal dan terlindungi menjadi lebih dominan. Kesenjangan layanan dasar antardaerah semakin kecil. Ekonomi digital dan hijau menjadi bagian normal dari struktur produksi, bukan sektor terpisah.

Untuk menjaga konsistensi roadmap, diperlukan indikator yang dapat dipantau lintas pemerintahan. Pertumbuhan PDB tetap penting, tetapi harus disandingkan dengan pertumbuhan pendapatan median, penurunan kemiskinan, Gini, upah riil, produktivitas, pekerjaan formal, partisipasi perempuan, mobilitas sosial, learning outcome, akses kesehatan, dan emisi. Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat diklaim hanya berdasarkan satu indikator yang membaik.

Roadmap juga perlu fleksibel karena dunia berubah cepat. Geopolitik, AI, perubahan iklim, pandemi, dan perubahan rantai pasok dapat mengubah prioritas. Strategic flexibility penting: arah besar tetap konsisten, tetapi instrumen disesuaikan berdasarkan data. Pemerintah perlu membangun kemampuan scenario planning dan early warning agar kebijakan tidak selalu reaktif.

17. Tantangan Implementasi dan Risiko Kebijakan

Agenda inklusif menghadapi beberapa risiko. Pertama, populisme jangka pendek. Kebijakan yang populer tetapi tidak produktif dapat menghabiskan ruang fiskal tanpa meningkatkan kapasitas masyarakat. Bantuan diperlukan, tetapi harus dibedakan antara perlindungan dan strategi pembangunan. Program konsumtif perlu diimbangi investasi manusia dan produktivitas.

Kedua, capture oleh kelompok kuat. Insentif industri, proyek infrastruktur, lahan, dan pengadaan dapat dikuasai kelompok yang memiliki akses politik. Jika ini terjadi, kebijakan yang secara formal bertujuan inklusif justru memperbesar rente. Transparansi, kompetisi, dan evaluasi independen menjadi penting.

Ketiga, koordinasi antarlembaga yang lemah. Banyak isu berada di antara kewenangan kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi, masyarakat menghadapi program yang tumpang tindih. Pembagian peran, data bersama, dan target lintas lembaga perlu diperjelas.

Keempat, kapasitas daerah yang tidak merata. Desentralisasi tanpa technical support dapat memperbesar kesenjangan. Daerah dengan kapasitas tinggi memanfaatkan dana lebih efektif, sedangkan daerah tertinggal tetap mengalami hambatan. Pemerintah pusat perlu menyediakan shared services, standardisasi data, dan pendampingan.

Kelima, technological exclusion. Digitalisasi layanan publik dapat mempersulit lansia, masyarakat miskin, dan daerah tanpa jaringan. Prinsip digital by default harus disertai assisted digital dan kanal non-digital. Teknologi harus memperluas, bukan menutup akses.

Keenam, risiko fiskal dan utang. Ambisi pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas pembiayaan. Proyek besar yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi dapat menjadi beban. Cost-benefit analysis dan value-for-money perlu diperkuat.

Ketujuh, ketidakpastian global. Perang dagang, volatilitas komoditas, perubahan suku bunga global, dan perlambatan ekonomi dunia dapat menekan ekspor dan investasi. Indonesia memerlukan diversifikasi pasar, ketahanan pangan-energi, serta pasar domestik yang kuat.

Kedelapan, perubahan iklim. Bencana dapat menghancurkan aset dan mendorong rumah tangga kembali miskin. Karena itu, climate adaptation harus terintegrasi dengan pembangunan, bukan dianggap biaya tambahan.

Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa implementasi membutuhkan tata kelola adaptif. Kebijakan harus memiliki feedback loop, evaluasi, dan kemampuan koreksi. Pemulihan inklusif bukan proyek dengan titik akhir tunggal, melainkan proses pembelajaran institusional.

18. Implikasi bagi Manajemen, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi

Pertumbuhan inklusif bukan tanggung jawab pemerintah saja. Dunia usaha menentukan struktur pekerjaan, upah, rantai pasok, inovasi, dan praktik lingkungan. Perusahaan yang mengejar produktivitas melalui pengembangan keterampilan, teknologi, dan keterlibatan pemasok lokal dapat memberi kontribusi besar terhadap inklusivitas. Sebaliknya, perusahaan yang hanya mengandalkan tenaga murah atau rente sumber daya mungkin tumbuh tanpa membangun kapabilitas nasional.

Manajemen perusahaan perlu melihat inklusi sebagai strategi daya saing. Workforce development mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas. Supplier diversity memperluas basis pemasok. Praktik ESG yang baik mengurangi risiko reputasi dan operasional. Produk yang terjangkau membuka pasar baru.

Dengan perspektif creating shared value, perusahaan dapat menghubungkan profit dengan penyelesaian masalah sosial.

Perguruan tinggi memiliki tiga peran. Pertama, menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan. Kedua, melakukan riset yang membantu pemerintah dan industri memecahkan masalah produktivitas dan inklusi. Ketiga, menjadi pusat lifelong learning bagi masyarakat. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan ijazah; ia harus menjadi knowledge infrastructure wilayah.

Sekolah bisnis dan program manajemen khususnya perlu memperluas pembelajaran dari shareholder value menuju stakeholder value. Mahasiswa harus mampu menganalisis dampak strategi terhadap pekerja, masyarakat, lingkungan, dan ketahanan rantai pasok. Data analytics, AI, sustainability, public policy, dan social innovation perlu masuk ke dalam kurikulum manajemen modern.

Kolaborasi university-industry-government dapat diwujudkan melalui living lab, teaching factory, riset terapan, incubator, dan executive education. Masalah nyata daerah dapat menjadi bahan penelitian mahasiswa S2 dan S3. Hasil penelitian kemudian diterjemahkan menjadi policy brief dan eksperimen kebijakan.

Dunia usaha juga dapat membantu pengurangan ketimpangan gender melalui childcare, fleksibilitas kerja, equal pay, dan jalur kepemimpinan. Perusahaan besar dapat membantu UMKM melalui mentoring dan standardisasi. Bahkan keputusan lokasi investasi dapat memperluas pusat pertumbuhan baru apabila didukung oleh infrastruktur dan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, agenda inklusif menciptakan paradigma manajemen baru: perusahaan tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi sebagai institusi ekonomi yang membentuk distribusi kesempatan. Keunggulan kompetitif jangka panjang akan semakin bergantung pada kemampuan membangun ekosistem yang produktif, dipercaya, dan berkelanjutan.

19. Tiga Ilustrasi Naratif Pemulihan Inklusif

Untuk melihat bagaimana gagasan pemulihan inklusif bekerja pada tingkat nyata, dapat dibayangkan tiga ilustrasi kebijakan. Ilustrasi pertama adalah sebuah kabupaten agraris yang sebagian besar rumah tangganya bergantung pada produksi pangan dan hortikultura. Secara statistik, pertumbuhan daerah dapat meningkat ketika harga komoditas naik. Namun kenaikan itu belum tentu inklusif apabila petani kecil tetap menjual hasil panen tanpa pengolahan, menghadapi biaya logistik tinggi, dan memperoleh bagian nilai tambah yang kecil. Dalam pendekatan inklusif, pemerintah daerah tidak berhenti pada bantuan benih. Ia membangun jaringan irigasi yang efisien, mendukung koperasi profesional, menyediakan fasilitas grading dan cold storage, memperbaiki jalan produksi, menghubungkan petani dengan platform informasi harga, dan mengundang industri pengolahan yang bersedia membeli dari pemasok lokal. SMK setempat membuka program teknisi mesin pertanian dan pengolahan pangan. Bank daerah dan lembaga keuangan menyediakan kredit berbasis kontrak penjualan. Hasil akhirnya bukan hanya kenaikan produksi, tetapi perubahan struktur pendapatan: petani memperoleh harga lebih baik, pemuda mendapat pekerjaan nonpertanian, perempuan memperoleh peluang pada pengolahan dan pemasaran, dan pemerintah daerah mendapat basis pajak yang lebih luas.

Dalam ilustrasi tersebut, inklusivitas muncul karena beberapa kebijakan saling terhubung. Jalan tanpa pasar tidak cukup, kredit tanpa kemampuan manajemen tidak cukup, dan pelatihan tanpa investasi juga tidak cukup. Ekosistem membuat setiap intervensi memperkuat intervensi lain. Jika pemerintah hanya mengukur keberhasilan dari tonase produksi, perubahan kesejahteraan mungkin tidak terlihat. Karena itu, indikator harus

mencakup pendapatan petani, proporsi hasil yang diolah lokal, jumlah pekerjaan baru, produktivitas per hektare, partisipasi perempuan, dan penurunan kehilangan pascapanen.

Ilustrasi kedua adalah kawasan industri baru yang menerima investasi besar. Dalam model pertumbuhan yang tidak inklusif, perusahaan mungkin mengimpor sebagian besar mesin, menggunakan pemasok dari luar daerah, merekrut tenaga terampil dari kota besar, dan mempekerjakan masyarakat lokal hanya pada pekerjaan berupah rendah. PDRB daerah meningkat cepat, tetapi ketimpangan meningkat dan masyarakat merasa menjadi penonton. Dalam model inklusif, pemerintah daerah sejak awal menyusun local economic linkage plan. Perusahaan memberikan proyeksi kebutuhan kompetensi tiga sampai lima tahun ke depan. Politeknik dan SMK menyesuaikan kurikulum. Program apprenticeship memungkinkan siswa belajar di perusahaan dengan standar keselamatan dan mentor yang jelas. Unit pengembangan pemasok memetakan UMKM yang berpotensi menyediakan catering, seragam, komponen, maintenance, logistik, packaging, dan jasa digital.

Pemerintah juga memastikan bahwa kawasan industri terhubung dengan transportasi publik dan perumahan yang layak. Tanpa itu, pekerja berupah menengah dapat kehilangan sebagian besar pendapatan untuk transportasi dan sewa. Layanan childcare memungkinkan lebih banyak perempuan masuk pasar kerja. Klinik kesehatan dan keselamatan kerja mengurangi risiko kecelakaan. Perusahaan, pemerintah, dan BPJS mengembangkan sistem transisi bagi pekerja yang terdampak restrukturisasi. Ketika perusahaan mengadopsi otomatisasi dan AI, pekerja tidak langsung dianggap surplus; mereka dipetakan untuk reskilling menuju fungsi quality control, data, maintenance, atau customer service.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa investasi menjadi inklusif ketika menghasilkan capability spillover. Nilai ekonomi tidak berhenti pada laporan keuangan perusahaan, tetapi menyebar ke tenaga kerja, pemasok, penyedia jasa, dan lembaga pendidikan. Dalam jangka panjang, daerah memperoleh kemampuan memproduksi barang dan jasa yang lebih kompleks. Inilah alasan kebijakan industri harus memperhitungkan kualitas linkage, bukan hanya besarnya modal yang masuk.

Ilustrasi ketiga adalah kota menengah yang tumbuh cepat karena sektor jasa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Kota ini menarik migrasi dari kabupaten sekitarnya. Tanpa kebijakan inklusif, harga tanah meningkat, kemacetan memburuk, pekerja berpendapatan rendah terdorong ke pinggiran, dan kesenjangan digital meningkat. Pemerintah kota kemudian menerapkan strategi urban inclusiveness. Transportasi publik menghubungkan kawasan hunian terjangkau dengan pusat pekerjaan. Tata ruang mendorong mixed-income housing dekat transit. Pasar tradisional direvitalisasi tanpa menggusur pedagang kecil. Internet publik dan pusat pembelajaran digital tersedia di kelurahan. Universitas membuka laboratorium kewirausahaan dan program micro-credential bagi pekerja dewasa.

Pada saat yang sama, pemerintah menggunakan data untuk mengidentifikasi kelompok rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Bantuan bersifat terarah, sementara kebijakan jangka panjang berfokus pada peningkatan pendapatan melalui keterampilan dan pekerjaan. Pelayanan publik dibuat digital tetapi tetap menyediakan assisted service bagi lansia dan masyarakat yang tidak mahir teknologi. Rumah sakit, kampus, hotel, dan kantor pemerintahan menggunakan pengadaan lokal untuk membuka pasar bagi UMKM. Kota juga membangun ruang publik, jalur pejalan kaki, dan pengelolaan sampah karena kualitas hidup merupakan bagian dari kesejahteraan, bukan kemewahan.

Ketiga ilustrasi itu menunjukkan satu prinsip: pertumbuhan inklusif membutuhkan desain institusional yang sengaja menghubungkan sumber pertumbuhan dengan kelompok masyarakat. Pasar dapat menghasilkan efisiensi dan inovasi, tetapi distribusi kesempatan sangat dipengaruhi oleh akses pendidikan,

infrastruktur, informasi, aset, dan jaringan. Kebijakan publik bekerja sebagai jembatan agar lebih banyak orang dapat masuk ke proses penciptaan nilai.

Dari perspektif manajemen, pendekatan ini serupa dengan mengelola sistem organisasi yang kompleks. Outcome tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengoptimalkan satu unit. Jika perusahaan ingin meningkatkan customer experience, ia perlu memperbaiki proses end-to-end; demikian pula pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan harus memperbaiki journey masyarakat dari pendidikan, masuk kerja, mengembangkan karier, membangun usaha, memiliki rumah, membesarkan keluarga, hingga menghadapi masa tua. Fragmentasi pelayanan menghasilkan friction cost yang paling berat bagi kelompok miskin karena mereka memiliki sedikit waktu, uang, dan informasi untuk menavigasi birokrasi.

Karena itu, konsep citizen journey dapat digunakan untuk merancang kebijakan inklusif. Seorang lulusan muda, misalnya, membutuhkan identitas digital, informasi lowongan, sertifikasi keterampilan, transportasi, dan mungkin bantuan relokasi. Seorang ibu pelaku UMKM membutuhkan izin usaha, rekening, pembayaran digital, pembiayaan, pengasuhan anak, dan pasar. Seorang petani membutuhkan informasi cuaca, input, lahan, penyuluhan, pembiayaan, asuransi, logistik, dan pembeli. Pemerintah dapat mengintegrasikan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna, bukan struktur organisasi birokrasi.

Pendekatan ini juga mengubah cara evaluasi. Program tidak lagi hanya menanyakan berapa orang yang dilayani, tetapi apakah perjalanan ekonomi mereka membaik. Apakah lulusan memperoleh pekerjaan? Apakah pendapatan UMKM meningkat? Apakah petani menerima bagian nilai tambah lebih besar? Apakah keluarga rentan mampu menghadapi guncangan tanpa menjual aset? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kebijakan lebih dekat dengan kesejahteraan nyata.

Selain itu, inklusivitas membutuhkan mekanisme umpan balik. Data kuantitatif harus dilengkapi informasi kualitatif dari masyarakat. Angka pengangguran yang rendah, misalnya, dapat menyembunyikan underemployment atau pekerjaan dengan jam dan pendapatan tidak memadai. Angka akses internet dapat menyembunyikan kualitas koneksi buruk. Angka kredit UMKM dapat menyembunyikan beban bunga atau penggunaan kredit untuk konsumsi. Karena itu, survei pengalaman pengguna, forum warga, dan analisis data mikro diperlukan untuk membaca realitas di balik indikator agregat.

Tiga ilustrasi tadi juga menunjukkan bahwa kebijakan inklusif tidak identik dengan pembagian bantuan. Justru inti pendekatan adalah memperkuat kemampuan produktif. Bantuan menjadi penting ketika orang menghadapi risiko yang tidak dapat mereka tanggung, tetapi tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan. Negara berperan sebagai enabler: menyediakan public goods, mengurangi hambatan, melindungi kompetisi, dan membantu transisi. Dunia usaha menciptakan pekerjaan dan inovasi. Masyarakat membangun usaha dan modal sosial. Perguruan tinggi menciptakan pengetahuan dan keterampilan.

Dengan kata lain, pemulihan inklusif adalah strategi untuk memperbesar jumlah pelaku yang mampu berpartisipasi dalam ekonomi berproduktivitas tinggi. Jika proses ini berhasil, pemerataan tidak hanya terjadi melalui redistribusi setelah pendapatan tercipta, tetapi sejak awal melalui distribusi kesempatan untuk menciptakan pendapatan. Ini merupakan bentuk pemerataan yang lebih kuat karena didasarkan pada kapabilitas dan partisipasi.

Namun pemerataan kesempatan tidak berarti mengabaikan perbedaan hasil. Ketika struktur awal sangat timpang, kelompok yang memiliki aset, pendidikan, dan jaringan lebih besar tetap memiliki keunggulan. Karena itu, affirmative support mungkin diperlukan bagi wilayah tertinggal, keluarga miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang menghadapi hambatan sistemik. Dukungan tersebut harus

dirancang untuk menghilangkan barrier dan membangun kapasitas, bukan menciptakan ketergantungan permanen.

Pada tingkat nasional, tiga ilustrasi itu dapat diterjemahkan ke dalam prinsip kebijakan: setiap proyek besar harus memiliki local linkage plan; setiap program sosial harus memiliki jalur menuju pemberdayaan bagi penerima yang mampu bekerja; setiap program digital harus memiliki indikator productive use; setiap reformasi iklim harus memiliki just-transition plan; dan setiap investasi pendidikan harus dihubungkan dengan outcome pembelajaran serta pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan inklusivitas sebagai parameter desain, bukan lampiran setelah kebijakan selesai.

Pemulihan ekonomi Indonesia akan semakin kuat ketika masyarakat melihat hubungan nyata antara pertumbuhan nasional dan kehidupan mereka. Legitimasi pertumbuhan tidak hanya berasal dari angka PDB, tetapi dari pengalaman: peluang kerja yang lebih baik, usaha yang berkembang, sekolah yang bermutu, layanan kesehatan yang dapat diandalkan, transportasi yang terjangkau, lingkungan yang sehat, dan keyakinan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Dalam pengertian inilah kesejahteraan yang lebih merata menjadi tujuan sekaligus sumber ketahanan ekonomi.

20. Mengukur Keberhasilan: Dari PDB ke Kesejahteraan Multidimensi

Keberhasilan pemulihan inklusif perlu diukur dengan seperangkat indikator yang mencerminkan pertumbuhan, distribusi, dan kapabilitas. PDB tetap diperlukan karena menggambarkan kapasitas produksi dan sumber daya yang tersedia untuk investasi serta pembiayaan publik. Namun PDB tidak memberitahu bagaimana pendapatan tersebar, apakah pekerjaan bermutu, apakah biaya hidup terjangkau, atau apakah masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar. Karena itu, dashboard kebijakan harus menempatkan indikator agregat dan distribusional secara berdampingan.

Pertumbuhan pendapatan median dapat menjadi pelengkap penting. Jika PDB per kapita meningkat tetapi pendapatan median stagnan, berarti kenaikan terutama terjadi pada bagian atas distribusi atau sektor yang tidak menyebarkan manfaat luas. Upah riil juga perlu dipantau karena menunjukkan daya beli pekerja setelah memperhitungkan inflasi. Bersama dengan produktivitas tenaga kerja, indikator ini dapat menunjukkan apakah peningkatan efisiensi diterjemahkan menjadi kesejahteraan pekerja.

Kemiskinan perlu dibaca bukan hanya sebagai headcount ratio, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Rumah tangga yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menghadapi masalah berbeda dari rumah tangga yang jauh di bawah garis tersebut. Selain itu, kelompok rentan di atas garis kemiskinan perlu dipantau karena satu guncangan kecil dapat membuat mereka kembali miskin. Pengukuran vulnerability-to-poverty membantu kebijakan menjadi preventif.

Ketimpangan tidak cukup dilihat melalui satu rasio. Gini dapat dilengkapi dengan pangsa pengeluaran 40 persen terbawah, rasio Palma, serta indikator kekayaan dan akses aset. Ketimpangan kesempatan juga penting: perbedaan hasil belajar berdasarkan latar belakang keluarga, akses layanan kesehatan, kepemilikan rumah, konektivitas digital, dan kesempatan kerja antarwilayah merupakan bentuk inequality of opportunity yang dapat berlangsung antargenerasi.

Dimensi pekerjaan harus mencakup jumlah orang bekerja, pengangguran, underemployment, formalitas, rata-rata jam kerja, coverage jaminan sosial, dan distribusi upah. Kenaikan pekerjaan paruh waktu yang tidak diinginkan dapat membuat statistik pengangguran membaik tanpa meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, indikator job quality perlu menjadi bagian dari laporan ekonomi nasional dan daerah.

Dimensi kapabilitas mencakup hasil belajar, kesehatan, stunting, akses air bersih, perumahan, internet, dan literasi digital. Tujuannya adalah melihat apakah masyarakat memperoleh fondasi untuk berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. Indikator gender dan kelompok rentan harus di-disaggregate sehingga kemajuan rata-rata tidak menutupi kesenjangan tertentu.

Terakhir, indikator lingkungan perlu masuk karena kesejahteraan jangka panjang bergantung pada kualitas udara, air, risiko bencana, dan ketahanan iklim. Daerah yang tumbuh cepat tetapi menghadapi polusi berat mungkin menghasilkan biaya kesehatan yang tidak tercermin dalam PDRB. Dengan dashboard multidimensi, kebijakan dapat menghindari keberhasilan semu dan menilai apakah pertumbuhan benar-benar meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

21. Kesimpulan

Pemulihan ekonomi inklusif adalah jalan untuk memastikan bahwa keberhasilan makroekonomi Indonesia diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. Data terbaru memperlihatkan kemajuan dalam pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, dan penyerapan tenaga kerja. Namun capaian agregat belum menghilangkan tantangan struktural berupa kualitas pekerjaan, informalitas, kesenjangan wilayah, kerentanan rumah tangga, perbedaan akses layanan dasar, dan kesenjangan kemampuan memanfaatkan teknologi.

Karena itu, kebijakan harus bergerak dari paradigma recovery menuju transformation. Pertumbuhan perlu didorong melalui investasi, industrialisasi, UMKM, digitalisasi, dan ekonomi hijau, tetapi sekaligus diarahkan untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan upah riil dan produktivitas, serta memperluas partisipasi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial adalah bagian dari strategi produktivitas, bukan semata-mata kebijakan sosial.

Inklusivitas juga membutuhkan institusi yang mampu memastikan kesempatan terbuka dan manfaat pertumbuhan tidak ditangkap oleh kelompok sempit. Tata kelola, desentralisasi yang efektif, data yang baik, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting. Pemerataan wilayah harus dilakukan melalui place-based strategy yang mengembangkan keunggulan masing-masing daerah dan menghubungkannya ke jaringan ekonomi nasional.

Tidak ada satu kebijakan tunggal yang dapat menghasilkan pertumbuhan inklusif. Yang dibutuhkan adalah ekosistem: pekerjaan, keterampilan, pembiayaan, teknologi, infrastruktur, perlindungan sosial, dan institusi harus saling melengkapi. Pemerintah menetapkan arah dan menyediakan public goods; dunia usaha menciptakan inovasi dan pekerjaan; perguruan tinggi membangun pengetahuan dan kompetensi; masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.

Jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata pada akhirnya bergantung pada kemampuan Indonesia mengubah pertumbuhan menjadi kapabilitas. Ketika lebih banyak orang memiliki kemampuan untuk belajar, bekerja produktif, berusaha, berinovasi, menjaga kesehatan, mengakses teknologi, dan menghadapi risiko, pertumbuhan menjadi lebih tahan lama. Inilah esensi pemulihan inklusif: bukan hanya memulihkan angka ekonomi, melainkan memperluas ruang bagi setiap warga untuk membangun masa depan yang lebih baik.

22. Rekomendasi Kebijakan Prioritas

- Menempatkan penciptaan pekerjaan berkualitas dan kenaikan produktivitas sebagai indikator inti keberhasilan pertumbuhan, bukan hanya jumlah pekerjaan.

- Mengintegrasikan kebijakan industri, investasi, pendidikan vokasi, UMKM, dan pengembangan pemasok lokal agar investasi menciptakan linkage domestik yang kuat.
- Membangun sistem lifelong learning nasional untuk reskilling dan upskilling pekerja yang terdampak digitalisasi, AI, dan transisi hijau.
- Memperkuat perlindungan sosial adaptif dan portable yang mendukung mobilitas kerja serta cepat merespons guncangan ekonomi, kesehatan, dan iklim.
- Mempercepat transformasi pertanian dan ekonomi desa melalui produktivitas, hilirisasi, cold chain, pembiayaan, koperasi modern, dan konektivitas digital.
- Mengembangkan place-based policy dan pusat pertumbuhan baru sehingga kawasan industri, pariwisata, dan hilirisasi memiliki keterkaitan nyata dengan tenaga kerja dan usaha lokal.
- Mengarahkan transformasi digital dan AI pada peningkatan capability masyarakat, dengan perhatian pada akses, keterampilan, keamanan, dan perlindungan data.
- Mengintegrasikan just transition dalam kebijakan energi dan iklim agar pekerja, daerah, dan rumah tangga rentan tidak menanggung biaya transisi secara tidak proporsional.
- Meningkatkan kualitas belanja publik melalui evaluasi berbasis outcome, transparansi, dan pengukuran dampak distribusional setiap program besar.
- Membangun dashboard pertumbuhan inklusif nasional-daerah yang menggabungkan pertumbuhan, pendapatan median, kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, produktivitas, layanan dasar, gender, dan lingkungan.

Glossarium

Istilah	Definisi
AI (Artificial Intelligence)	Sistem komputasi yang melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan kognitif manusia, seperti analisis, prediksi, dan generasi konten.
Aspiring middle class	Kelompok rumah tangga yang berada di atas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi setara kelas menengah mapan.
Blended finance	Penggabungan dana publik, filantropi, dan swasta untuk menurunkan risiko dan memobilisasi investasi pembangunan.
Flexicurity	Pendekatan pasar kerja yang menggabungkan fleksibilitas bagi perusahaan dengan jaminan keamanan pendapatan, pelatihan, dan mobilitas bagi pekerja.
Formalitas kerja	Kondisi pekerjaan/usaha yang tercatat secara hukum dan biasanya memiliki kontrak, kepatuhan, serta akses perlindungan sosial.
Gini Ratio	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, dari 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang).
Growth Incidence Curve	Kurva yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan/pengeluaran pada berbagai persentil distribusi.
Inclusive growth	Pertumbuhan yang memperluas partisipasi ekonomi dan menyebarkan manfaat secara luas sambil menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
Just transition	Transisi menuju ekonomi rendah karbon yang melindungi pekerja dan masyarakat yang terdampak perubahan struktur industri.
Learning account	Skema pembiayaan yang memberi individu hak atau dana untuk mengikuti pelatihan sepanjang hayat.

Local supplier development	Program peningkatan kapasitas pemasok lokal agar dapat masuk ke rantai pasok perusahaan besar.
Mobilitas sosial	Kemampuan individu atau rumah tangga untuk berpindah ke tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih tinggi.
NEET	Not in Employment, Education, or Training; pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan.
PEGR	Poverty-Equivalent Growth Rate, ukuran yang menggabungkan pertumbuhan dan perubahan distribusi untuk menilai sifat pro-poor suatu pertumbuhan.
Place-based policy	Kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan hambatan spesifik suatu wilayah.
Produktivitas	Jumlah output atau nilai tambah yang dihasilkan per unit input, misalnya per pekerja atau per jam kerja.
Pro-poor growth	Pertumbuhan yang memberikan manfaat signifikan kepada kelompok miskin dan membantu menurunkan kemiskinan.
Reskilling	Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar dapat berpindah ke pekerjaan atau fungsi berbeda.
Social registry	Basis data rumah tangga/individu yang digunakan untuk penargetan dan administrasi program perlindungan sosial.
Transformasi struktural	Perubahan komposisi ekonomi dari kegiatan berproduktivitas rendah menuju kegiatan bernilai tambah dan produktivitas lebih tinggi.
Upskilling	Peningkatan keterampilan agar seseorang dapat bekerja lebih efektif atau mengambil tanggung jawab lebih tinggi pada bidang yang sama.
Value chain	Rangkaian kegiatan dari input, produksi, pengolahan, distribusi, hingga layanan yang menghasilkan nilai ekonomi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. Berita Resmi Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026a, February 5). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Berita Resmi Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026b, February 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. Berita Resmi Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026c, February 5). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. Berita Resmi Statistik.
- Bank Indonesia. (2026). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025. Bank Indonesia.
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2014). Does economic growth really benefit the poor? Income distribution dynamics and pro-poor growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227-242. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938405>
- Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The determinants of inclusive economic growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 16(2). <https://doi.org/10.21831/economia.v16i2.29342>
- Jamil, H. (2022). Less inclusive growth in Indonesia? The unintended consequences of internet penetration. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 11(2). <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.53871>

-
- Priscilla, H., Rindayati, W., & Anggraeni, L. (2025). Effect of fiscal decentralization and institutional performance on inclusive growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 174-192. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.2.2025.174-192>
- Pukuh, N., & Widyasthika, H. F. (2017). When growth is inclusive in Indonesia? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3). <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.19>
- Ratnawati, K. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: Evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- Rini, D. L., & Tambunan, T. T. H. (2021). Inclusive economic growth of Indonesia and its determinants: Recent evidence with provincial data. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 4(1). <https://doi.org/10.34256/ajir2118>
- Soleh, A., & Suwarni. (2023). Inclusiveness of economic growth in Indonesia: The poverty approach. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 804-811. <https://doi.org/10.29210/020231783>